

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fachmi, 2011, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed.2 Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hariato, Teguh, 2008, *Efektifitas Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam rangka Pengembalian Kerugian Negara*, Tesis, Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hartati, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Kholis, Efi Laila, 2012, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Pers, Malang.

- Lamintang, P.A.F., 1984, *Hukum Penitesier Indonesia*, CV Armico, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 3, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lopa, Achmad, 2009, *Peranan Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) dalam Upaya Penegakan Hukum Sengketa Perdata Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti*, Tesis, Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Lopa, Baharuddin, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Kompas.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Santoso, Muhari Agus, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang
- Semma, Mansyur, 2008, *Negara dan Korupsi*, Jakarta, Yayasan obor Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sumaryanto, Djoko, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.

Wojowasito, S. -W. J. S., *Poerwadarminta, Kamus lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Hasta, Bandung

Zulfa, Eva Achjani dan Indriyanti Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, CV. Lubuk Agung, Bandung

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772.

Peraturan Kejaksaan Agung Nomor: B-779/F/Fjp/Ft/10/2005 Tentang Eksekusi Uang Pengganti.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: SE-004/JA/1988 Tentang Gugatan perdata apabila pembayaran uang pengganti belum terbayar.

Fatwa Mahkamah Agung Nomor: 37/T4/88/66/Pid tanggal 12 Januari 1988 Tentang Tata cara penyitaan eksekusi pidana uang pengganti.

### **C. Jurnal, Karya Ilmiah dan Internet**

Hariato, Teguh, 2008, "Efektifitas Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam rangka Pengembalian Kerugian Negara", *Tesis*, Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Khilman, Iman, 2016, “Peran Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Lopa, Achmad, 2009, “Peranan Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) dalam Upaya Penegakan Hukum Sengketa Perdata Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti”, *Tesis*, Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Madusira, Muhammad Aras, 2011, “Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sudrajat, Wahyu, 2016, *Tinjauan Kritis Terhadap Ketentuan Putusan Bebas dan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Menurut Pasal 191 Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Tesis, Universitas Gadjah Mada.
- Pradipto, Rimawan, Timotius Hendrik Partohap dan Pramashavira,” Korupsi Struktural; Analisis Database Korupsi Versi 4 (2001-2015)”, <http://cegahkorupsi.feb.ugm.ac.id/publikasi>, diakses 24 Agustus 2016.
- Detik News, “Uang Pengganti Kurang karena Koruptor Pilih Jalani Hukuman Subsider”, <http://news.detik.com/berita/1224496/uang-pengganti-kurang-karena-koruptor-pilih-jalani-hukuman-subsider>, diakses 10 Juni 2016.
- Kompas, (“Rp 14,5 Triliun Belum Dibayar”), *Kompas Cetak*, 16 Maret 2016.